

*Jurnal*  
**YUDISIAL**

Vol. 17 No. 2 Agustus 2024 Hal. 147 - 294

# “CHILD PROTECTION”



**KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**J**urnal Yudisial merupakan majalah ilmiah yang memuat hasil kajian/riset atas putusan-putusan pengadilan oleh jejaring peneliti dan pihak-pihak lain yang berkompeten. Jurnal Yudisial terbit berkala empat bulanan di bulan April, Agustus, dan Desember.

Penanggung Jawab: Arie Sudihar

Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI

Redaktur:

1. Juma'in
2. Dinal Fedrian

Penyunting:

1. Imran (Hukum Pidana)
2. Fajri Nursyamsi (Hukum Tata Negara)
3. Muhammad Ilham (Hukum Administrasi Negara)
4. Ikhsan Azhar (Hukum Tata Negara)
5. Atika Nidyandari (Hukum Dagang)
6. Nurasti Parlina (Hukum Pidana dan Perdata)
7. Rina Susani (Hukum Pidana)

Sekretariat:

1. Priskilla Siregar
2. Noercholysh
3. Wirawan Negoro
4. Didik Prayitno
5. Yuni Yulianita

Desain Grafis

dan Fotografer:

1. Arnis Duwita Purnama
2. Widya Eka Putra

Alamat:

Sekretariat Jurnal Yudisial Komisi Yudisial Republik Indonesia  
Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat, Telp. 021-3905876, Fax. 021-3906189

Email: [jurnal@komisiyudisial.go.id](mailto:jurnal@komisiyudisial.go.id)

Website: [www.jurnal.komisiyudisial.go.id](http://www.jurnal.komisiyudisial.go.id)

## “CHILD PROTECTION ”

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, disebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, pengertian anak adalah mereka yang belum berumur 19 tahun. Jadi yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah.

Posisi anak menjadi rentan saat terjadinya perselisihan dalam keluarga. Kebanyakan orang tua yang mengalami ketidaksesuaian lagi dalam rumah tangganya sehingga berujung ke pengadilan untuk bercerai, hanya memikirkan kehidupan pribadinya tanpa memikirkan nasib anak-anaknya pasca perceraian. Hal ini dapat diketahui dari tingginya angka perceraian pasangan suami istri yang telah mempunyai anak, mereka tidak mempersoalkan di pengadilan tentang anak-anak mereka yang rentan terdampak perceraian tersebut. Sikap abai terhadap anak-anak korban perceraian orang tuanya bukan hanya dilakukan oleh para orang tua anak-anak tersebut, melainkan juga oleh para hakim pengadilan ketika menangani perkara perceraian yang terdapat anak di dalamnya. Sebagian besar para hakim yang mengadili perkara perceraian tersebut juga bersikap abai terhadap perlindungan anak korban perceraian orang tuanya.

Dalam tulisan Jurnal Yudisial kali ini, terdapat setidaknya lima tulisan yang mengangkat isu mengenai perlindungan anak, baik secara eksplisit maupun tidak. Dua tulisan mengangkat tema hak nafkah anak setelah perceraian. Satu naskah mengangkat kedudukan anak yang berkewarganegaraan ganda dan terjebak dalam sengketa yang dilakukan oleh orang tua mereka. Satu naskah mengangkat perbuatan perzinahan di mana anak mengetahui kejadian tersebut. Satu naskah mengangkat kekerasan seksual yang dialami oleh banyak anak dalam lembaga yang seharusnya melindungi mereka. Dalam kelima naskah tersebut dapat dibaca bahwa orang dewasa malah menjadi pihak yang gagal dalam melindungi anak. Baik orang tua, pengajar, bahkan aparat penegak hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih ada yang salah dalam ketentuan hukum kita untuk memberikan hak anak tumbuh berkembang dan mendapat rasa aman. Analisis dari kelima tulisan dalam Jurnal Yudisial edisi ini, diharapkan setidaknya dapat membuka mata dan hati mereka yang dewasa dalam memosisikan anak di antara himpitan hukum. Proses penegakan hukum bagi dewasa saja cukup melelahkan, apalagi bagi anak.

Tidak ketinggalan dua naskah lagi yang menarik untuk dibaca. Salah satunya mengenai kontroversi pencalonan presiden dan wakil presiden di pemilu lalu. Satu lagi, setelah

sekian lama, Jurnal Yudisial mendapat kehormatan untuk menerima tulisan dalam bahasa asing. Semoga kelak akan ada lagi tulisan-tulisan lain yang dapat dimuat oleh Jurnal Yudisial dalam bahasa asing, agar Jurnal Yudisial bisa semakin menjangkau pembaca asing melalui tulisan putusan hukum lainnya.

Terakhir, Redaksi berharap semoga pembaca mendapatkan ilmu pengetahuan baru mengenai hukum setelah membaca Jurnal Yudisial.

Salam, dan selamat membaca.

Tertanda

Pemimpin Redaksi Jurnal Yudisial

<b>PEMAKNAAN PUTUSAN PLURALITAS DALAM SYARAT PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN .....</b>	<b>147 - 166</b>
Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023	
Dian Agung Wicaksono & Bimo Fajar Hantoro	
Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum	
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	
<b><i>QUO VADIS</i> PENGATURAN PERKAWINAN CAMPURAN DALAM BINGKAI PEMBENAHAN HUKUM KEWARGANEGARAAN INDONESIA .....</b>	<b>167 - 190</b>
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 dan Nomor 69/PUU-XIII/2015; Putusan Nomor 279/Pdt.G/2006/PA.Jpr; Nomor 297/Pdt/2009/PT.Smg; dan Nomor 321/Pdt/2009/PT.Smg	
Bagus Hermanto	
Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar	
<b>SIGNIFIKANSI ALAT BUKTI TERTULIS SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS KASUS PERCERAIAN .....</b>	<b>191 - 208</b>
Kajian Putusan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN.Yyk	
Muhammad Syahri Ramadhan, Vegitya Ramadhani Putri, & Henny Yuningsih	
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang	
<b>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH ANAK MURTAD PASCA PERCERAIAN .....</b>	<b>209 - 224</b>
Kajian Putusan 428/Pdt.G/2021/PA.Sgta	
Muhammad Ariful Fahmi & Dzulkifli Hadi Imawan	
Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam	
Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta	
<b>MENALAR PUTUSAN SURAT DAKWAAN YANG BATAL DEMI HUKUM DALAM DELIK PERZINAAN .....</b>	<b>225 - 241</b>
Kajian Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN.Kdi	
Fatwa Al Yusak & Hariman Satria	
Mahasiswa Pascasarjana - Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari, Kendari	

**PENJATUHAN PIDANA MATI KEKERASAN SEKSUAL  
TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF**

**HAKASASI MANUSIA ..... 242 - 268**

Kajian Putusan Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022

Warih Anjari & Nur Mailinda

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Jakarta

***THE ANOMALY OF PRETRIAL AUTHORITY***

***IN INDONESIAN LAW ENFORCEMENT ..... 269 - 294***

An Analysis of Decision Number 24/PID/PRA/2018/PN.JKT.SEL

Zico Junius Fernando

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu

**JURNAL YUDISIAL**

p-ISSN 1978-6506/e-ISSN 2579-4868

Vol. 17 No. 2 Agustus 2024

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.

Wicaksono DA & Hantoro BF (Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)

Pemaknaan Putusan Pluralitas dalam Syarat Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

*Jurnal Yudisial* 2024 17(2), 147-166

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah memperluas persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dari hanya memuat minimal umur 40 tahun menjadi rumusan alternatif dengan penyempadanan jabatan publik tertentu. Meski demikian, dalam komposisi lima hakim konstitusi yang mengabulkan permohonan, terdapat keterbelahan antara pendapat pluralitas yang didukung oleh tiga hakim konstitusi dengan alasan berbeda yang ditulis oleh dua hakim konstitusi. Kondisi ini harus dimaknai sebagai keputusan pluralitas. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengulas konsep putusan pluralitas sebagai perspektif dalam memaknai putusan dengan suara mayoritas terbelah. Pertanyaan yang harus dijawab adalah bagaimana seharusnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 ditinjau dari perspektif putusan pluralitas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus putusan pluralitas, putusan harus ditafsirkan berdasarkan posisi yang diambil oleh para anggota yang setuju dengan putusan dengan alasan yang paling sempit. Berdasarkan kaidah ini, perluasan syarat pencalonan dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 harus dibaca sebagai

“memperluas syarat pencalonan hanya untuk yang berpengalaman sebagai gubernur.”

(Dian Agung Wicaksono & Bomo Fajar Hantoro)

Kata kunci: interpretasi; putusan pluralitas; persyaratan calon presiden dan wakil presiden.

Hermanto B (Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar)

*Quo Vadis* Pengaturan Perkawinan Campuran dalam Bingkai Pembinaan Hukum Kewarganegaraan Indonesia

Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 dan Nomor 69/PUU-XIII/2015; Putusan Nomor 279/Pdt.G/2006/PA.Jpr; Nomor 297/Pdt/2009/PT.Smg; dan Nomor 321/Pdt/2009/PT.Smg

*Jurnal Yudisial* 2024 17(2), 167-190

Dinamika pasca reformasi mendorong sejumlah perubahan dan pergeseran paradigmatis terhadap tatanan ketatanegaraan Indonesia, terkait aspek kewarganegaraan yang mengalami sejumlah pergeseran dan perubahan dalam kurun dua dekade terakhir. Pergeseran karakter ketatanegaraan yang mendorong reformasi hukum kewarganegaraan juga mendorong sejumlah isu sensitif termasuk perkawinan campuran menjadi salah satu aspek penting yang diatur dalamnya. Namun demikian problematis mengemuka ditandai dengan temuan sejumlah putusan pengadilan dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang mencirikan perlunya pembenahan pengaturan kewarganegaraan khususnya perkawinan campuran ke depan. Tulisan ini menelisik lebih jauh terkait dengan dinamika pada putusan pengadilan serta pelbagai pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan perkawinan campuran dalam konteks pembenahan hukum kewarganegaraan di Indonesia, serta tulisan ini mengkaji dan menganalisis lebih mendalam terkait

<p><i>ius constituendum</i> pengaturan kewarganegaraan yang khususnya menyangkut perkawinan campuran. Adapun permasalahan yang dianalisis pada tulisan ini terkait dengan dinamika dan problematik perkawinan campuran yang muncul dalam telaah putusan pengadilan dan Putusan Mahkamah Konstitusi, serta pengaturan ke depan terkait perkawinan campuran yang merefleksikan hak asasi manusia. Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dalam bingkai penelitian hukum makro menasar pada pendekatan perundang-undangan, konseptual hukum serta studi kasus hukum. Hasil akhir tulisan ini bahwa problematik yang fundamental berangkat dari masalah formal dan material pengaturan kewarganegaraan berimplikasi terhadap pengaturan perkawinan campuran yang ditandai sebagai problematik sebagaimana sejumlah putusan pengadilan dan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait. Tawaran alternatif yang penting yakni reformulasi Undang-Undang Kewarganegaraan yang mengatur terkait perkawinan campuran mencirikan nilai hak asasi manusia ke depan.</p> <p style="text-align: right;">(Bagus Hermanto)</p> <p>Kata kunci: pengaturan perkawinan campuran; hukum kewarganegaraan; <i>ius constituendum</i>.</p>	<p>emosional dan ekonomi penggugat serta anak-anak mereka. Penelitian ini menekankan pentingnya alat bukti tertulis dalam proses litigasi, khususnya dalam pengajuan klaim nafkah anak dan biaya pendidikan, yang merupakan hak asasi fundamental bagi anak-anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan preskriptif, yang memungkinkan analisis mendalam terhadap ketentuan hukum yang relevan, termasuk undang-undang tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan hakim didasarkan pada ketentuan hukum yang mewajibkan penggugat untuk menyertakan bukti tertulis yang berkaitan dengan pendapatan tergugat sebagai dasar penetapan kewajiban finansial. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa alat bukti tertulis memegang peranan sentral dalam pembuktian perkara perdata dan mengonfirmasi perlunya substansi serta legitimasi bukti dalam mencapai keadilan di pengadilan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa penguatan legitimasi dan keabsahan bukti dalam proses hukum sangat penting, demikian pula urgensi bagi para pihak dalam perkara perceraian untuk mempersiapkan bukti yang memadai demi mencapai putusan yang adil.</p> <p style="text-align: right;">(Muhammad Syahri Ramadhan, Vegitya Ramadhani Putri, &amp; Henny Yuningsih)</p> <p>Kata kunci: alat bukti tertulis; kewajiban nafkah; validitas bukti; konflik rumah tangga.</p>
<p>Ramadhan MS., Putri VR., &amp; Yuningsih H (Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang)</p> <p>Signifikansi Alat Bukti Tertulis Sebagai Pertimbangan Hakim dalam Memutus Kasus Perceraian</p> <p>Kajian Putusan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN.Yyk</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2024 17(2), 191-208</p> <p>Tulisan ini menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 153/Pdt.G/2021/PN.Yyk yang memutus perkara perceraian, yang mencerminkan dinamika kompleks dalam konflik rumah tangga. Penggugat mengalami tekanan psikologis yang signifikan akibat tindakan tergugat, yang mencakup perbuatan tercela seperti perselingkuhan, alkoholisme, dan perjudian. Tindakan tersebut tidak hanya menyebabkan tergugat gagal memenuhi kewajiban nafkah, tetapi juga merusak kestabilan</p>	<p>Fahmi MA &amp; Imawan DH (Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta)</p> <p>Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Murtad Pasca Perceraian</p> <p>Kajian Putusan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Sgta</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2024 17(2), 209-224</p> <p>Penelitian ini membahas tentang pemenuhan nafkah anak murtad pasca perceraian orang tuanya pada Putusan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Sgta. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis masalah perlindungan hukum terhadap pemenuhan nafkah</p>



<p>anak murtad pasca terjadinya perceraian orang tuanya dalam tinjauan hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan (<i>library research</i>), dengan merujuk kepada dokumen-dokumen atau literatur yang terkait dengan perkara nafkah anak dan putusan yang dibahas. Selanjutnya bahan-bahan tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim dalam Putusan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Sgta dalam pertimbangannya telah mendasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (<i>the best interest of the child</i>), hukum positif, dan hukum Islam dengan menghukum ayah kandung untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya meskipun anak-anak tersebut sudah berpindah agama (murtad). Putusan ini juga memberikan perlindungan hukum bagi anak murtad pasca terjadinya perceraian, karena telah memberikan kepastian hukum untuk terpenuhinya hak-hak anak berupa nafkah bagi mereka sampai dewasa, atau dapat mengurus diri sendiri dan mandiri, atau sekurang-kurangnya anak tersebut telah berusia 21 tahun, atau jika anak tersebut telah menikah.</p> <p>(Muhammad Ariful Fahmi &amp; Dzulkiffi Hadi Imawan)</p> <p>Kata kunci: nafkah <i>madhiyah</i>; perlindungan anak; anak murtad.</p>	<p>objek putusan ini berkaitan dengan tindak pidana perzinahan. Dalam putusan ini, majelis hakim menilai bahwa dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum tidak memenuhi syarat formil yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan bahwa dakwaan tersebut batal demi hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis kualitatif. Analisis dilakukan melalui penggabungan pendekatan kasus dan konseptual. Hasil penelitian mengungkapkan beberapa alasan yang melatarbelakangi putusan tersebut. <i>Pertama</i>, dakwaan dinyatakan batal demi hukum karena dianggap tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, sehingga unsur-unsur delik yang didakwakan tidak terhubung dengan fakta-fakta materiil yang relevan. <i>Kedua</i>, meskipun dakwaan jaksa penuntut umum memiliki kekurangan, majelis hakim tidak seharusnya langsung menyatakan batal demi hukum, karena hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 angka 11 jo. Pasal 194 KUHAP. <i>Ketiga</i>, pembatalan dakwaan tidak sesuai dengan jenis putusan akhir dalam perkara ini. <i>Keempat</i>, merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-XX/2022, jaksa penuntut umum seharusnya mengajukan kembali dakwaan ke Pengadilan Negeri Kendari agar perkara dapat dilanjutkan ke tahap persidangan.</p> <p>(Fatwa Al Yusak &amp; Hariman Satria)</p> <p>Kata kunci: putusan; surat dakwaan; perzinahan.</p>
<p>Al Yusak F &amp; Satria H (Mahasiswa Pascasarjana - Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari, Kendari)</p> <p>Menalar Putusan Surat Dakwaan yang Batal Demi Hukum dalam Delik Perzinahan</p> <p>Kajian Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN.Kdi</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2024 17(2), 225-241</p> <p>Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN.Kdi merupakan putusan yang mengundang polemik karena dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dinyatakan batal demi hukum. Kasus yang menjadi</p>	<p>Anjari W &amp; Mailinda N (Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Jakarta)</p> <p>Penjatuhan Pidana Mati Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia</p> <p>Kajian Putusan Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2024 17(2), 242-268</p> <p>Kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia merupakan masalah serius yang mendesak perhatian masyarakat. Dampak dari</p>

tindak pidana ini sangat membahayakan, sehingga diperlukan penegakan hukum yang luar biasa baik dalam substansi maupun penerapannya. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kasus kekerasan seksual yang diputus berdasarkan Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2022/PN.Bdg jo. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg dan Putusan Nomor 5645 K/Pid.Sus/2022, yang menjatuhkan terpidana dengan hukuman mati. Penerapan pidana mati dalam kasus ini berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, baik bagi korban maupun terpidana. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada penjatuhan pidana mati atas tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, dengan merujuk pada Putusan Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022, ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. Dalam analisis ini, digunakan teori pembedaan dan teori hak asasi manusia, yang mencakup hak hidup terpidana serta hak hubungan orang tua dan anak, khususnya bagi anak sebagai korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan data sekunder dari studi pustaka, mengadopsi pendekatan undang-undang, kasus, dan konsep hak asasi manusia. Kesimpulannya, penjatuhan pidana mati dalam Putusan Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022 berpotensi melanggar hak asasi manusia, sehingga pidana seumur hidup menjadi alternatif yang lebih sesuai karena memungkinkan terpidana menjalankan kewajibannya sebagai orang tua terhadap anak dari korban kekerasan seksual.

(Warih Anjari & Nur Mailinda)

Kata kunci: kekerasan seksual; korban anak; hak asasi manusia.

Fernando ZJ (Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu)

Anomali Kewenangan Praperadilan dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia

Kajian Putusan Nomor 24/PID/PRA/2018/PN.JKT. SEL

*Jurnal Yudisial* 2024 17(2), 269-294

Putusan Praperadilan Nomor 24/PID/PRA/2018/

PN.JKT.SEL yang dikeluarkan pada 9 April 2018 menjadi titik perhatian dalam skandal korupsi Bank Century. Dalam putusannya, Hakim Tunggal Effendi Mukhta memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melanjutkan proses penyidikan atau melimpahkan kasus tersebut kepada kepolisian dan kejaksaan untuk penanganan lebih lanjut. Putusan ini juga menetapkan status hukum pejabat senior, seperti mantan Gubernur dan Deputy Gubernur Bank Indonesia Boediono dan Muliawan D Hadad, serta mantan Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan Raden Pardede. Putusan ini kontroversial karena status hukum beberapa terdakwa tidak jelas. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Penelitian ini bersifat deskriptif dan preskriptif dengan menganalisis berbagai sumber hukum serta putusan-putusan pengadilan sebelumnya. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa putusan praperadilan tersebut menimbulkan kontroversi dan memicu perhatian hukum yang signifikan. Putusan ini memperluas kewenangan praperadilan dengan memerintahkan penetapan tersangka terhadap individu yang tidak terlibat langsung dalam peradilan. Hal ini melampaui batas kewenangan yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 82 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, serta Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. **Keputusan yang berlebihan** ini memiliki implikasi yuridis yang signifikan, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan melanggar kepastian hukum bagi para tersangka. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan perumusan kembali prosedur praperadilan, pelatihan yang komprehensif bagi hakim dan penegak hukum, pengembangan pedoman yang konsisten, serta penguatan mekanisme pengawasan untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam proses praperadilan.

(Zico Junius Fernando)

Kata kunci: kewenangan praperadilan: *judicial overreach*; kepastian hukum; *judicial review*; reformasi hukum.

The Descriptors given are free terms. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge.

Wicaksono DA & Hantoro BF (Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)

The Interpretation of Plurality Decision for the Presidential and Vice-Presidential Candidate's Requirements

An Analysis of Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 (Org. Ind)

*Jurnal Yudisial* 2024 17(2), 147-166

Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 has expanded the requirements for candidacy for president and vice president in Article 169 letter q of Law Number 7 of 2017 from only containing a minimum age of 40 years to an alternative formulation with the equivalent of certain public positions. However, in the composition of the five constitutional judges who granted the petition, there was a divide between the plurality opinion supported by three constitutional judges and the concurrence written by two constitutional judges. This condition should be interpreted as a plurality decision. This research is intended to review the concept of plurality decisions as a perspective in interpreting decisions with a split majority vote. The question that must be answered is how Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 be viewed from the perspective of a plurality decision. This research is normative legal research using a statutory, conceptual, case, and comparative approach. The research results show that in the case of a plurality decision, the decision must be interpreted based on the position taken by those members who concurred with the judgments on the narrowest grounds. Based on this rule, the expansion of nomination requirements in Article 169 letter q of Law Number 7 of 2017 in the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 should be read as "expanding nomination

requirements only for those with experience as governors."

(Dian Agung Wicaksono & Bimo Fajar Hantoro)

Keywords: interpretation; plurality decision; presidential and vice-presidential candidate's requirements.

Hermanto B (Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar)

Quo Vadis Mixed Marriage Arrangements in the Frame of Revamping Indonesian Citizenship Law

An Analysis of Constitutional Cour Decision Number 80/PUU-XIV/2016 and Number 69/PUU-XIII/2015; Decision Number 279/Pdt.G/2006/PA.Jpr; Number 297/Pdt/2009/PT.Smg; and Number 321/Pdt/2009/PT.Smg (Org. Ind)

*Jurnal Yudisial* 2024 17(2), 167-190

Post-reform dynamics have driven significant changes and paradigmatic shifts in Indonesia's constitutional framework, particularly in citizenship law, which has undergone notable transformations over the past two decades. These governance shifts have driven citizenship legislation reforms, bringing sensitive issues, including mixed marriages, into focus as a critical regulatory area. However, challenges have arisen, as evidenced by various judicial decisions and Constitutional Court decisions that underscore the urgency of reforming citizenship regulations, particularly in mixed marriages in the future. This paper explores the legal dynamics and implications of court decisions and Constitutional Court decisions regarding mixed marriages, situating these within Indonesia's broader framework of citizenship law reform. It further examines the *ius constituendum* (the ideal future legal framework) for citizenship regulation, particularly emphasizing mixed marriages. The

<p>issues addressed in this study include the dynamics and problems of mixed marriages as reflected in judicial and Constitutional Court decisions; and prospective regulatory frameworks for mixed marriages that uphold fundamental human rights principles. This paper uses normative research methods in macro legal research targeting the approach of legislation, legal facts, legal concepts, and legal case studies. The final result indicates that fundamental issues in the formal and substantive aspects of citizenship regulation significantly impact the governance of mixed marriages, as reflected in various judicial and Constitutional Court decisions. An important alternative offer is the reformulation of citizenship laws governing mixed marriages that characterize the value of human rights in the future.</p> <p style="text-align: right;">(Bagus Hermanto)</p> <p>Keywords: formulation of a mixed marriage; the law on citizenship; ius constituendum.</p>	<p>expenses, which are recognized as fundamental rights of children. The methodological approach employed in this study is normative legal research utilizing a prescriptive framework, thereby enabling a comprehensive analysis of pertinent legal provisions, including statutes governing marriage and their corresponding regulations. The findings reveal that the judicial decision is grounded in legal requirements mandating the plaintiff to submit documentary evidence pertinent to the defendant's income to establish financial obligations. This investigation underscores the centrality of documentary evidence in civil adjudication and reaffirms the necessity for substantive and legitimate evidence in pursuing justice within the judicial system. Therefore, it is concluded that reinforcing the legitimacy and validity of evidence in legal proceedings is paramount, as is the imperative for parties engaged in divorce proceedings to prepare adequate evidence to achieve a fair outcome.</p>
<p>Ramadhan MS., Putri VR., &amp; Yuningsih H (Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang)</p> <p>The Significance of Written Evidence on Judge Consideration in Divorce Case</p>	<p style="text-align: right;">(Muhammad Syahri Ramadhan, Vegitya Ramadhani Putri, &amp; Henny Yuningsih)</p> <p>Keywords: written evidence; alimony obligations; evidence validity; domestic disputes.</p>
<p>An Analysis of Decision Number 153/Pdt.G/2021/PN.Yyk (Org. Ind)</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2024 17(2), 191-208</p> <p>This study analyses the judge's considerations in Decision Number 153/Pdt.G/2021/PN.Yyk, which pertains to a divorce case that encapsulates the intricate dynamics characteristic of domestic disputes. The plaintiff endures considerable psychological distress attributable to the defendant's actions, which encompass morally reprehensible behaviors, including infidelity, alcoholism, and gambling. Such conduct precipitates the defendant's failure to fulfill alimony obligations and severely disrupts the emotional and economic stability of the plaintiff and their children. This research accentuates the critical significance of documentary evidence within the litigation framework, particularly in the context of claims for child support and educational</p>	<p>Fahmi MA &amp; Imawan DH (Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta)</p> <p>Legal Protection Against Livelihood Fulfilment for Apostate Child After Divorce</p> <p>An Analysis of Decison Number 428/Pdt.G/2021/PA.Sgta (Org. Ind)</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2024 17(2), 209-224</p> <p>This research discusses the fulfillment of livelihood for the apostate child after their parents' divorce in Decision Number 428/Pdt.G/2021/PA.Sgta. It aims to analyze the issue of legal protection against the fulfillment by reviewing positive law and Islamic law aspects. This study employed normative legal research, using primary, secondary, and tertiary legal materials collected through library research and referring to documents or literature related to</p>

<p>child livelihood cases and decisions discussed. Those materials were then processed and analyzed descriptively and qualitatively. The analysis results showed that the panel of judges in Decision Number 428/Pdt.G/2021/PA.Sgta, in its consideration, is based on the principle of the best interest of the child, positive law, and Islamic law by punishing the biological father for providing a living to his children even though the child had converted (apostate). This decision also gives legal protection to apostate children in post-divorce because it has provided legal certainty for the children's rights fulfillment in the form of living until they become adults or can take care of themselves and be independent or at least the child is twenty-one years old or if the child is married.</p> <p style="text-align: right;">(Muhammad Ariful Fahmi &amp; Dzulkifli Hadi Imawan)</p> <p>Keywords: madhiyah livelihood; child protection; apostate child.</p>	<p>analysis. The analysis was conducted through the integration of case and conceptual approaches. The findings reveal several reasons underlying the decision. First, the charge was declared null and void because it was deemed imprecise, unclear, and incomplete, resulting in the elements of the offense not being adequately linked to relevant material facts. Second, despite the deficiencies in the charge, the judges should not have immediately declared it null and void, as this contradicts Article 1 point 11 in conjunction with Article 194 of the Criminal Procedure Code. Third, the charge's annulment was inconsistent with the type of final judgment required in this case. Fourth, based on Constitutional Court Decision Number 8/PUU-XX/2022, the public prosecutor should have resubmitted the charge to the Kendari District Court to allow the case to proceed to trial.</p> <p style="text-align: right;">(Fatwa Al Yusak &amp; Hariman Satria)</p> <p>Keywords: decision; charge; adultery.</p>
<p>Al Yusak F &amp; Satria H (Mahasiswa Pascasarjana - Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari, Kendari)</p> <p>Examining Legal Precedent Charge Nullified and Voided in Adultery Cases</p> <p>An Analysis of Decision Number 501/Pid.B/2022/PN.Kdi (Org. Ind)</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2024 17(2), 225-241</p> <p>Decision Number 501/Pid.B/2022/PN.Kdi has sparked controversy due to the charge filed by the public prosecutor being declared null and void by law. The case in question pertains to the criminal offense of adultery. In this judgment, the panel of judges concluded that the charge prepared by the public prosecutor did not fulfill the formal requirements as mandated by the applicable laws and regulations. This decision raises critical questions about the legal reasoning behind the judge's determination that the charge was nullified. This research study employs a normative legal methodology with a qualitative juridical approach, combining case and conceptual</p>	<p>Anjari W &amp; Mailinda N (Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Jakarta)</p> <p>The Imposition of Death Penalty in Sexual Violence Against Minors Through Human Rights Perspectives</p> <p>An Analysis of Decision Number 5642 K/Pid. Sus/2022 (Org. Ind)</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2024 17(2), 242-268</p> <p>Sexual violence against minors in Indonesia constitutes a grave societal concern that necessitates urgent attention from the public and legal authorities alike. The ramifications of such offenses are profoundly detrimental, thereby requiring extraordinary measures in both legal substance and enforcement. This paper endeavors to conduct a comprehensive analysis of a sexual violence case adjudicated under Decision Number 989/Pid. Sus/2022/PN.Bdg in conjunction with Decision Number 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg and Decision Number 5645 K/Pid.Sus/2022, resulting in the imposition of the death penalty upon the convicted</p>

individual. The application of capital punishment in this context raises significant concerns regarding potential violations of human rights, affecting both the victim and the accused. Accordingly, the focal point of this analysis is the imposition of the death penalty for sexual violence against minors, with specific reference to Decision Number 5642 K/Pid. Sus/2022, examined through the perspectives of human rights. The analysis is grounded in theories of punishment and human rights, addressing the defendant's right to life alongside the rights of parental relationships, particularly as they relate to minor victims. The methodology employed is normative legal research, utilizing secondary data from a thorough literature review and adopting statutory, case law, and human rights frameworks. The findings conclude that the imposition of the death penalty in Decision Number 5642 K/Pid. Sus/2022 poses a substantial risk of infringing upon human rights; consequently, life imprisonment is advocated as a more applicable alternative, enabling the defendant to fulfill parental obligations toward the sexual violence victim's child.

(Warih Anjari & Nur Mailinda)

Keywords: sexual violence; minor victims; human rights.

Fernando ZJ (Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu)

The Anomaly of Pretrial Authority in Indonesian Law Enforcement

An Analysis of Decision Number 24/PID/PRA/2018/PN.JKT.SEL (Org. Ind)

*Jurnal Yudisial* 2024 17(2), 269-294

Pretrial Decision Number 24/PID/PRA/2018/PN.JKT.SEL, issued on 9 April 2018, became crucial in the Bank Century corruption scandal. In its ruling, Single-Judge Effendi Mukhtar ordered the Corruption Eradication Commission to continue the investigation or, if necessary, transfer the case to the police and the prosecutor's office for further handling. It also clarified the legal status of senior

officials, including former Bank Indonesia Governor Boediono, Deputy Governor Muliawan D Hadad, and former Secretary of the Financial System Stability Committee Raden Pardede. The decision sparked controversy due to the unclear legal status of certain defendants. This study employs a normative legal research method with a literature review using legislative, conceptual, and case-based approaches. This analysis is descriptive-prescriptive, examining legal sources and previous rulings. The result shows that the pretrial decision has sparked controversy and attracted significant legal attention. It extends pretrial authority by designating suspects not directly involved in the case. The ruling is assumed to exceed jurisdictional limits set by Article 1 point 10, Article 82 of the Criminal Procedure Code, Supreme Court Regulation Number 4 of 2016, and Article 53 of Law Number 48 of 2009, which may lead to injustice and undermine legal certainty for the defendant. Therefore, addressing this issue requires revising pretrial procedures, training judges and law enforcement, developing consistent guidelines, and strengthening oversight to ensure fairness and transparency.

(Zico Junius Fernando)

Keywords: pretrial authority; judicial overreach; legal certainty; judicial review; legal reform.